

Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Ratih Purwasih¹, Anna Yulianita^{2✉}, Rela Sari³

¹²³Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan

annayulia@unsri.ac.id

Abstract

The government is required to present quality financial reports as a form of accountability to the public. This study aims to analyze the effects of the implementation of government accounting standards, the utilization of institutional-level financial application system, the administration of state property and the implementation of reconciliation on the quality of government financial reports. The population in this study were the employees of finance and state property within the Directorate General of Public Health, Ministry of Health of the Republic of Indonesia, totaling 56 peoples. The sampling technique is the census method, in which all members of the population are sampled. The data used in this research is primary data with data collection techniques through questionnaires. The data analysis method used in this research is SEM-PLS by using SmartPLS. The results of this study indicate that the implementation of government accounting standards, the utilization of institutional-level financial application system, the administration of state property and the implementation of reconciliation each have a positive and significant effect on the quality of government financial report. This shows that increasing the implementation of government accounting standards, the utilization of institutional-level financial application system, the administration of state property and the implementation of will have an impact on improving the quality of government financial report.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Application System, State Property, Reconciliation, Financial Report.

Abstrak

Pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengelola keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel dengan metode sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah SEM-PLS dengan menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Aplikasi Keuangan, Barang Milik Negara, Rekonsiliasi, Laporan Keuangan.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Paradigma baru serta perubahan yang sangat pesat saat ini terjadi di dalam perkembangan lembaga sektor publik di Indonesia yakni semakin dibutuhkan akuntabilitas dari lembaga sektor publik tersebut, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah [1]. Akuntabilitas diartikan sebagai wujud dari kewajiban organisasi publik dalam menginformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan mengenai semua kegiatan dan pencapaian kinerja pemerintah sehingga pemerintah harus selalu menerapkan transparansi dalam kegiatannya [2]. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam bentuk laporan

keuangan pemerintah [3]. Masyarakat semakin menuntut peningkatan dalam pelayanan dan akuntabilitas pemerintah sehingga pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi publik [4]. Laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara berupa laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh semua entitas di pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah [5].

Pada tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini

adalah opini terbaik atas audit laporan keuangan yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara sehingga semakin membaiknya kualitas pelaporan atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [6]. Pemeriksaan atas LKPP tahun 2021 juga mencakup pemeriksaan secara intensif mengenai program Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang memperoleh alokasi dana yang cukup besar yaitu Rp744,77 triliun dengan realisasi mencapai Rp655,14 triliun atau 87,96%. Anggaran terbesar dalam program PC-PEN dialokasikan pada sektor kesehatan sebesar Rp214,96 triliun dengan realisasi mencapai Rp198,14 triliun atau 92,17%. Opini WTP yang diperoleh atas LKPP tahun 2021 ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang konsisten dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menghadapi pandemi Covid 19. Pencapaian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara bijaksana, transparan, profesional serta bertanggungjawab guna menjaga kepercayaan public [7].

Meskipun demikian, laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2021 mengungkapkan beberapa permasalahan terkait belum memadainya sistem informasi dan pelaporan dalam anggaran dan realisasi pada program PC-PEN maupun program prioritas nasional, serta tidak memadainya pengendalian atas pelaksanaan belanja untuk program PC-PEN pada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga. Selain itu, dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk belanja selain program PC-PEN pada 80 (delapan puluh) Kementerian/Lembaga dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan [8]. Pada akhirnya dari hasil pemeriksaan BPK disimpulkan bahwa akuntabilitas, kepatuhan dan transparansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 belum sepenuhnya tercapai [9]. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi diberikan oleh BPK khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan dalam pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah ke depannya. Fenomena inilah yang menjadikan kualitas laporan keuangan masih menjadi isu menarik untuk terus diteliti hingga saat ini [10]. Opini WTP yang diperoleh dari BPK bukan berarti laporan keuangan sudah dianggap berkualitas dan bebas dari berbagai catatan dan temuan [11]. Dalam hal ini pemerintah juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tentang kualitas laporan keuangan harus terus dilakukan dan dikembangkan [12].

Berbagai penelitian tentang kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan di berbagai sektor publik dan swasta [13]. Penelitian di sektor publik lebih banyak fokus pada kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah sehingga penelitian paling banyak dilakukan pada lingkup pemerintah daerah, yaitu pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal [14]. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan, sumber daya manusia, pengendalian intern, sistem informasi akuntansi serta komitmen organisasi, audit internal dan deteksi fraud serta tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan audit dan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan regulasi dan politik dan faktor lainnya [15].

Setelah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji ulang variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan [16]. Di sini penulis menambahkan variabel baru yaitu pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi [17]. Penggunaan variabel pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi merupakan sebuah kebaruan karena baru diimplementasikan di seluruh entitas pemerintahan di seluruh Kementerian/Lembaga mulai tahun 2022. Variabel penatausahaan barang milik negara meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik negara sesuai peraturan. Variabel pelaksanaan rekonsiliasi dimana pelaksanaannya dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI juga baru diimplementasikan mulai tahun 2022. Penelitian dilakukan dalam lingkup salah satu kementerian yang ada di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan RI.

Laporan keuangan pemerintah adalah bagian dari akuntansi keuangan sektor publik, yang merupakan suatu pernyataan (asersi) dari pihak pemerintah selaku pemegang amanat dalam mengelola anggaran yang diberikan kepadanya yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat [18]. Dewan IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) telah mengeluarkan kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan tujuan umum. Karakteristik kualitas informasi dalam laporan keuangan merujuk pada tujuan umum pelaporan keuangan tersebut [19]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya [20]. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan basis akrual. Pada pemerintah

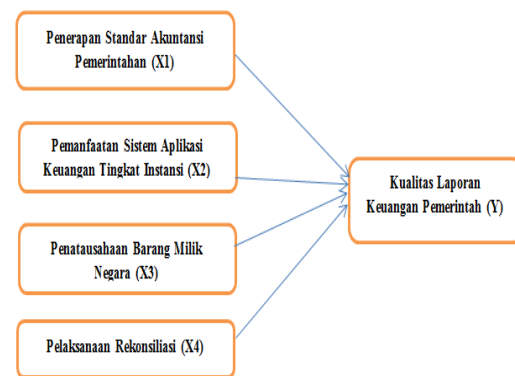
pusat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diatur dengan peraturan menteri keuangan dan pada pemerintah daerah penerapannya diatur dengan peraturan menteri dalam negeri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dijelaskan bahwa “Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara”. Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini sebagai salah satu perangkat yang mendukung sistem akuntansi instansi dalam menghasilkan laporan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tertib administrasi dalam penatausahaan barang milik negara diharapkan mampu menghasilkan informasi yang akurat mengenai jumlah aset yang dimiliki negara sehingga data yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan pemeriksaan fisik di lapangan dan sesuai dengan laporan inventarisasi barang.

Salah satu kunci utama dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akuntabel adalah dengan melaksanakan rekonsiliasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, “pelaksanaan rekonsiliasi perlu dilakukan untuk menjamin akurasi dan kevalidan data akuntansi yang sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut H1 adalah Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. H2 adalah Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H3 adalah Penatausahaan barang milik negara berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. H4 adalah Pelaksanaan rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya kerangka konseptual ditampilkan pada Gambar 1.



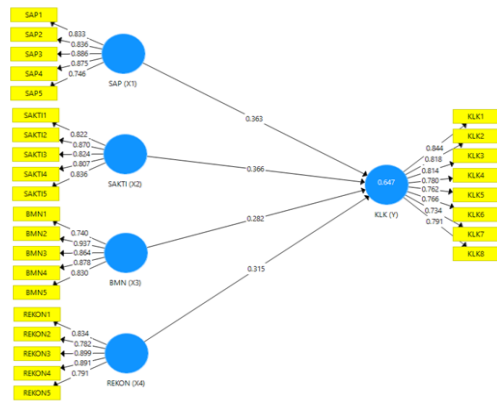
Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang mencari hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan data primer di mana data tersebut akan diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur pengelola keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang berjumlah 56 (lima puluh enam) orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh atau sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (X_2), Penatausahaan Barang Milik Negara (X_3) dan Pelaksanaan Rekonsiliasi (X_4), sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Untuk pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala *Likert* 5 (lima) poin. Setiap variabel independen diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator sedangkan variabel dependen diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan diperoleh data responden dengan karakteristik yaitu berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, pangkat/golongan, lama bekerja dan kursus/diklat/bimtek di bidang keuangan yang telah diikuti seperti yang dijabarkan pada Tabel 1.



Gambar 2. Diagram Jalur Outer Loadings

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	24 orang	42,90
2	Perempuan	32 orang	57,1
	Jumlah	56 orang	100
No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA/ sederajat	2 orang	3,60
2	Diploma 3	10 orang	17,90
3	Strata 1	38 orang	67,80
4	Strata 2	6 orang	10,70
5	Strata 3	-	-
	Jumlah	56 orang	100
No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan II	6 orang	10,70
2	Golongan III	48 orang	85,70
3	Golongan IV	2 orang	3,60
	Jumlah	56 orang	100
No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1	1-5 tahun	8 orang	14,30
2	6-10 tahun	16 orang	28,60
3	11-15 tahun	16 orang	28,60
4	16-20 tahun	4 orang	7,10
5	> 20 tahun	12 orang	21,40
	Jumlah	56 orang	100
No	Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Keuangan yang Telah Diikuti	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	13 orang	23,20
2	Pernah (1-3 kali)	32 orang	57,10
3	Sering (4-10 kali)	9 orang	16,10
4	Sangat Sering (> 10 kali)	2 orang	3,60
	Jumlah	56 orang	100

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) terdiri uji validitas konstruk dan uji reliabilitas. Pengujian validitas konstruk meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Berikut disajikan Diagram Jalur *Outer Loadings* dengan melakukan kalkulasi PLS *Algorithm* yang ditampilkan pada Gambar 2.

Berdasarkan nilai *loading factor* pada Gambar 2 dilihat bahwa seluruh indikator pada variabel SAP, SAKTI, BMN, REKON dan KLK memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh indikator pada setiap variabel telah memenuhi syarat validitas konvergen. Pengujian validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan pendekatan *Fornell-Larcker Criterion*. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika nilai akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Nilai *Fornell-Larcker Criterion* dari setiap variable disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	SAP	SAKTI	BMN	REKON	KLK
SAP	0,837				
SAKTI	0,179	0,832			
BMN	0,178	0,152	0,853		
REKON	0,137	0,121	0,154	0,841	
KLK	0,522	0,512	0,451	0,453	0,789

Berdasarkan Tabel 2 dengan *Fornell-Larcker Criterion* dapat dilihat variabel SAP, SAKTI, BMN, REKON dan KLK mempunyai nilai akar AVE yang lebih besar daripada nilai korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam model sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dalam model ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Berdasarkan Tabel 3 bahwa variabel SAP, SAKTI, BMN, REKON dan KLK mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7 dan nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dalam model ini telah memenuhi syarat reliabilitas.

Tabel 3. *Construct Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
SAP	0,892	0,921
SAKTI	0,890	0,918
BMN	0,904	0,930
REKON	0,896	0,923
KLK	0,913	0,930

Untuk mengevaluasi kolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus lebih tinggi dari 0,2 (kurang dari 5). Dari Tabel 4 dapat dilihat nilai VIF dari setiap variabel eksogen memiliki

nilai lebih tinggi dari 0,2 (kurang dari 5) sesuai dengan persyaratan sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah kolineritas dalam model ini.

Tabel 4. *Collinearity Statistics* (VIF)

Variabel	VIF Values
SAP	1,069
SAKTI	1,057
BMN	1,065
REKON	1,045

Nilai *R Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai *R-Square* 0,75 mengindikasikan bahwa model kuat, nilai 0,50 *moderate* atau sedang dan 0.25 lemah. Dari hasil perhitungan SmartPLS diperoleh nilai *R Square* dalam model ini yaitu sebesar 0,647. Berdasarkan nilai tersebut model termasuk dalam kategori *moderate* atau sedang. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan Rekonsiliasi (REKON) secara bersama-sama mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLK) sebesar 64,7% sedangkan sisanya sebesar 35,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki nilai *f Square* sebesar 0,349 dan termasuk dalam kategori sedang dalam memberikan efek terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memiliki nilai *f Square* sebesar 0,359 dan termasuk dalam kategori besar dalam memberikan efek terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki nilai *f Square* sebesar 0,212 dan termasuk dalam kategori sedang dalam memberikan efek terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel Pelaksanaan Rekonsiliasi (REKON) memiliki nilai *f Square* yaitu sebesar 0,269 dan termasuk dalam kategori sedang dalam memberikan efek terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari keempat variabel eksogen, variabel Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memberikan efek atau pengaruh paling besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 5. *Effect Size* (*f Square*)

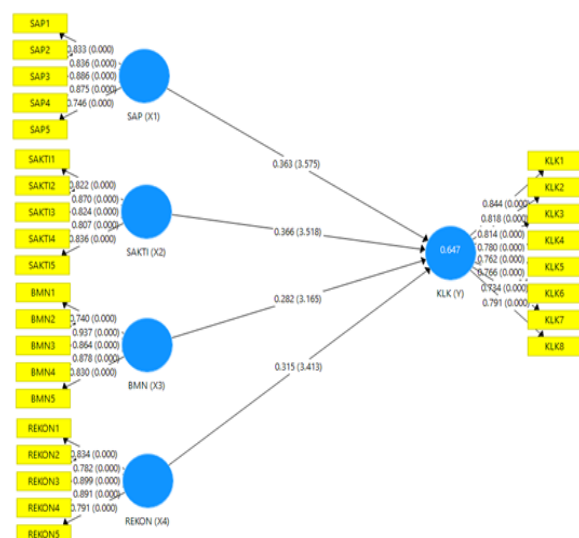
Variabel	<i>f Square</i>
SAP	0,349
SAKTI	0,359
BMN	0,212
REKON	0,269

Cross-validated redundancy (Q2) digunakan untuk menilai *predictive relevance* yang menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan menunjukkan kesesuaian relevansi model secara struktural. Nilai Q2 didapat dengan melakukan kalkulasi *Blindfolding*. Berikut disajikan nilai Q2 dari model ini. Selanjutnya construct crossvalidated redundancy disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. *Construct Crossvalidated Redundancy*

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
SAP	280,000	280,000	
SAKTI	280,000	280,000	
BMN	280,000	280,000	
REKON	280,000	280,000	
KLK	448,000	288,595	0,356

Dari Tabel 6 dilihat nilai *Cross-validated redundancy* (Q2) model ini adalah sebesar 0,356. Nilai Q2 > 0 artinya model ini mempunyai *predictive relevance* yang cukup akurat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai observasi yang dilakukan sudah baik dan kesesuaian relevansi model secara struktural juga baik. Pengukuran koefisien jalur (*path coefficients*) antar konstruk dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut serta untuk menguji hipotesis. Nilai *path coefficients* berkisar di antara -1 hingga +1. Apabila nilai semakin mendekati +1, maka semakin kuat hubungan kedua konstruk. nilai yang semakin mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan bersifat *negative*. Koefisien signifikan apabila nilai t-statistics di atas 1,65 dengan signifikansi level 5% (*one tailed*). Berikut disajikan Diagram Jalur *Path Coefficient* dengan melakukan kalkulasi *Bootsrapping* pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Jalur *Path Coefficients*

Pengaruh dari setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah sebagai berikut nilai *path coefficient* variabel SAP terhadap KLK sebesar positif 0,363. Nilai *t-statistic* sebesar 3,575 dengan *p value* sebesar 0,000 dimana nilainya lebih besar dari 1,65

(tingkat signifikansi 5%). Hal menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Nilai *path coefficient* variabel SAKTI terhadap KLK sebesar positif 0,366. Nilai *t-statistic* sebesar 3,518 dengan *p value* sebesar 0,000 dimana nilainya lebih besar dari 1,65 (tingkat signifikansi 5%). Hal menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Hipotesis kedua (H2) dapat diterima.

Nilai *path coefficient* variabel BMN terhadap KLK sebesar positif 0,282 dan Nilai *t-statistic* sebesar 3,165 dengan *p value* sebesar 0,001 dimana nilainya lebih besar dari 1,65 (tingkat signifikansi 5%). Hal menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Hipotesis ketiga (H3) dapat diterima. Nilai *path coefficient* variabel REKON terhadap KLK sebesar positif 0,315. Nilai *t-statistic* sebesar 3,413 dengan *p value* sebesar 0,000 di mana nilainya lebih besar dari 1,65 (tingkat signifikansi 5%). Hal menunjukkan bahwa Pelaksanaan Rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Hipotesis keempat (H4) dapat diterima.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangannya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan Teori *Stewardship* dimana pemerintah dituntut agar menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik. Pembuktian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah memanfaatkan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam menyusun laporan keuangannya, baik di tingkat satuan kerja pusat maupun daerah. Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan penatausahaan barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah melakukan penatausahaan barang milik negara dalam penyusunan laporan keuangannya. Penatausahaan barang milik negara yang baik akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Tertib administrasi dalam penatausahaan barang milik negara diharapkan mampu menghasilkan informasi yang akurat mengenai jumlah aset yang dimiliki negara sehingga data yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan pemeriksaan fisik di lapangan dan sesuai dengan laporan inventarisasi barang. Pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Mulai tahun 2022 pelaksanaan rekonsiliasi di seluruh entitas pemerintahan di lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan menggunakan aplikasi MonSAKTI. Pelaksanaan rekonsiliasi melalui sistem yang terintegrasi ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Data berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, kompetensi rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan rekonsiliasi akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari hasil penelitian nilai *R Square* sebesar 64,7% menunjukkan bahwa masih terdapat 35,3% variabel lain yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang dianggap turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan lain sebagainya. Bagi instansi pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI hendaknya terus

melakukan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan antara lain dapat dilakukan dengan secara rutin dan berkala mengadakan kursus, diklat atau bimtek di bidang keuangan bagi seluruh aparatur pengelola keuangan dan barang milik negara.

Daftar Rujukan

- [1] Eveline, F. (2017). Pengaruh SAP Berbasis Akruai, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(1), 1–14. DOI: <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004> .
- [2] Mirnawati, M., Nirwana, E., & Hendarsyah, D. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 31–44. DOI: <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73> .
- [3] Javanparast, S., Baum, F., Freeman, T., Ziersch, A., Henderson, J., & Mackean, T. (2019). Collaborative Population Health Planning Between Australian Primary Health Care Organisations and Local Government: Lost Opportunity. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 43(1), 68–74. DOI: <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12834> .
- [4] Widaryani, H. U., & -, K. (2020). Analysis of Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 53–59. DOI: <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.23123> .
- [5] Anwar, R., & Ishak, P. (2021). Determinations Affecting The Quality Of Local Government Reports With Human Resources And Organizational Culture As Moderated Variables. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(1), 94. DOI: <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i1.1435> .
- [6] Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3). DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2003130> .
- [7] Sumual, F. M., Saerang, D. P. E., Karamoy, H., & Tawas, H. N. (2021). Revisiting The Determinants of Local Government Performance. *Accounting*, 7(7), 1751–1756. DOI: <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.022> .
- [8] Kasiewicz, S. (2017). New Trends In The System Regulating The Market of Bank Services. *Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie*, 45(4), 7–21. DOI: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7450> .
- [9] Park, S., Kim, H., & Park, C. G. (2021). Determinants of Long-Term Care Insurance Applications In South Korea. *Journal of Public Health (United Kingdom)*, 43(3), 604–610. DOI: DOI: <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa094> .
- [10] Kapinos, K., Briscoombe, B., Gracner, T., Strong, A., Whaley, C., Hoch, E., ... Chen, P. (2017). Challenges to the Sustainability of the U.S. Public Cord Blood System. *Challenges to the Sustainability of the U.S. Public Cord Blood System*. RAND Corporation. DOI: <https://doi.org/10.7249/rr1898> .
- [11] Bajwa, S. S., & Mehdiratta, L. (2021). Research And COVID-19: Losing Momentum Every Now and Then. *Indian Journal of Anaesthesia*, 65(7), 508. DOI: https://doi.org/10.4103/ija.ija_623_21 .
- [12] Costales, A., Delgado, C., Catelo, M. A., Lapar, M. L., Tiongco, M., Ehui, S., & Bautista, A. Z. (2007). Scale and Access Issues Affecting Smallholder Hog Producers In An Expanding Peri-Urban Market: Southern Luzon, Philippines. *Research Report of the International Food Policy Research Institute*, (151), 1–72. DOI: <https://doi.org/10.2499/9780896291591rr151> .
- [13] Brooks, R., & Waters, J. (2011). Conclusion. In *Student Mobilities, Migration and the Internationalization of Higher Education* (pp. 160–172). Palgrave Macmillan UK. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230305588_8 .
- [14] Nguyen Trong, H., Dang, T. V., Nguyen, V., & Nguyen, T. T. (2022). Determinants of E-Government Service Adoption: An Empirical Study for Business Registration In Southeast Vietnam. *Journal of Asian Public Policy*, 15(3), 453–468. DOI: <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1805396> .
- [15] Alhanatleh, H., Aboalganam, K., & Awad, H. (2022). Electronic Government Public Value of Public Institutions In Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, 6(1), 27–36. DOI: <https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.007> .
- [16] Haneem, F., Kama, N., Taskin, N., Pauleen, D., & Abu Bakar, N. A. (2019). Determinants of Master Data Management Adoption by Local Government Organizations: An Empirical Study. *International Journal of Information Management*, 45, 25–43. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007> .
- [17] Sharma, S. K., Al-Badi, A., Rana, N. P., & Al-Azizi, L. (2018). Mobile Applications In Government Services (mG-App) from User's Perspectives: A Predictive Modelling Approach. *Government Information Quarterly*, 35(4), 557–568. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.07.002> .
- [18] Erimlata, S. (2016). Pendekatan Hot-Fit Framework dalam Generalized Structural Component Analysis pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Sebuah Pengujian Efek Resiprokal. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 141–157. DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0051.141-157> .
- [19] Sayogo, D. S., & Pardo, T. A. (2013). Exploring The Determinants of Scientific Data Sharing: Understanding The Motivation to Publish Research Data. *Government Information Quarterly*, 30(SUPPL. 1). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.011> .
- [20] McGill, E., Egan, M., Petticrew, M., Mountford, L., Milton, S., Whitehead, M., & Lock, K. (2015). Trading Quality for Relevance: Non-Health Decision-Makers' Use of Evidence on The Social Determinants of Health. *BMJ Open*, 5(4). DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007053> .